

KOMITMEN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA, SOSIAL DAN PELIBATAN MASYARAKAT PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA

Hutan Harapan adalah konsesi restorasi ekosistem (RE) pertama di Indonesia. Hutan Harapan diinisiasi oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (Burung Indonesia, BirdLife International dan RSPB). Pemegang izin restorasi ekosistem (IUPHHKRE) di Hutan Harapan adalah PT REKI. IUPHHKRE dimaksud terdiri dari dua izin yakni di wilayah Sumatra Selatan dan wilayah Jambi. Restorasi ekosistem bertujuan untuk mengembalikan produktivitas dan keseimbangan ekosistem hutan. Dalam mencapai tujuan di atas, PT REKI berkomitmen menerapkan kebijakan penghormatan hak asasi manusia, sosial dan pelibatan masyarakat atau **Human Rights, Social and Community Engagement Commitment (HARSCEC)**.

HARSCEC dibuat PT REKI sebagai bentuk komitmen digunakannya pendekatan penghormatan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip sosial dalam upaya restorasi ekosistem. guna memberikan arahan kepada manajemen PT REKI beserta jajarannya dan semua pihak terkait. Kebijakan ini terintegrasi dalam rencana upaya restorasi hutan oleh PT REKI sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis pengelolaan Hutan Harapan tahun 2014-2040.

PT REKI berkomitmen untuk memastikan kegiatan restorasi ekosistem respek terhadap Hak Asasi Manusia dan memberikan dampak positif kepada para pihak terutama masyarakat adat, lokal dan terkena dampak. Komitmen ini sejalan dengan konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hak-hak Perempuan, Hak-hak Perburuhan dan Deklarasi Umum PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Untuk itu kami mengikuti Pedoman HAM terkait, diantaranya pedoman Pedoman *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang merupakan standar bagi perusahaan untuk menghormati semua hak asasi manusia dan dampak sosial yang diakui secara internasional yang relevan dengan operasi kami. Prinsip kami yaitu ketika terdapat hukum nasional dan hak asasi manusia internasional yang berbeda, maka kami akan mengikuti standar hukum yang lebih tinggi, ketika terdapat pertentangan, kami akan mematuhi hukum nasional sambil mencari cara untuk menghormati hak asasi manusia internasional semaksimal mungkin.

Turunan dari komitmen ini menyangkut, di antaranya

1. Menjalankan Uji Tuntas (*Due Diligent*) terkait Penghormatan Hak Asasi Manusia
2. Mengimplementasikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATAPA masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terlegitimasi berdasarkan adat dan pemerintah.
3. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
4. Penanganan Penyelesaian konflik yang responsif dan bertanggung jawab
5. Melibatkan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional secara terbuka dan konstruktif
6. Mengembangkan Program pemberdayaan masyarakat secara Kolaboratif berbasis sumberdaya budaya dan alam/hutan
7. Pengakuan, perlindungan dan penguatan hak-hak para pekerja
8. Patuh terhadap norma-norma lokal dan semua hukum yang relevan
9. Melakukan analisa dampak hak asasi manusia dan dampak sosial (SIA)

1. Menjalankan Uji Tuntas (Due Diligent) Terkait Penghormatan Hak Asasi Manusia

PT. REKI menghormati Hak Asasi Manusia dalam operasional usahanya. Terkait dengan implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Perusahaan, PT. REKI akan melaksanakan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia untuk melihat kesiapan dan membangun peta jalan penghormatan Hak Asasi Manusia tersebut.

2. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATAPA masyarakat adat dan masyarakat lokal.

PT REKI menghormati dan mengakui hak-hak adat dan individu dari masyarakat adat dan lokal terhadap ruang kelola dan tanah mereka yang ada sejak lampau yang terlegitimasi, dan berkomitmen untuk memastikan FPIC/PADITAPA dari masyarakat ini sebelum memulai setiap program dan kegiatan baru. Komitmen ini awali dengan transparansi analisis dampak dari kegiatan kami. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan dalam berbagai bentuk dan disajikan dengan bahasa yang relevan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Selain itu, implementasi kebijakan ini akan mencakup: 1) Menggunakan pendekatan pemetaan partisipatif untuk memastikan seluruh lahan masyarakat adat dan lokal sebelum dilakukan Negosiasi, 2) Menggunakan prosedur dan kelembagaan masyarakat yang legal dan adanya legitimasi oleh masyarakat dalam mencapai kesepakatan, 3) Mendorong lahirnya kesepakatan tanpa tekanan dan paksaan, 4) Transparansi proses dan hasil PADIATAPA, dan (5) Semua proses didokumentasikan dan kesepakatan yang ditandatangani para pihak relevan.

3. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab

Menanggapi keluhan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan akuntabilitas PT REKI. PT REKI percaya bahwa pemangku kepentingan yang mana pun memiliki hak untuk mengemukakan suatu keluhan, mendapatkan penanganan keluhan serta menerima respon atas kesalahan atau tindakan yang salah.

PT REKI akan menyiapkan dan mengimplementasikan mekanisme formal untuk mengumpulkan, memantau dan bertindak atas masukan dari para penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Kami akan mengembangkan dan menjaga proses penanganan semua keluhan secara bertanggung jawab. Proses ini akan dikembangkan dengan berkonsultasi pada para pemangku kepentingan, dan akan dibuat tersedia untuk umum.

Keluhan dapat berasal dari pendukung, organisasi mitra, masyarakat atau setiap individu yang bekerja dengan PT REKI atau setiap anggota masyarakat baik perseorangan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan atau badan/lembaga lainnya.

4. Penanganan Penyelesaian konflik yang responsif dan bertanggung jawab

Kami berkomitmen untuk secara aktif dan responsif mempromosikan, serta mendukung penyelesaian yang bertanggung jawab dari setiap konflik terkait kegiatan PT REKI. Hal ini mencakup bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati oleh semua pihak berkonflik, menghormati hak-hak adat dan individu, dan memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATAPA dari para pemangku kepentingan yang relevan mengenai kesepakatan penyelesaian apapun. Kami juga berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik untuk mencegah pemaksaan yang dapat berujung pada kekerasan yang tak perlu. Untuk itu PT. REKI akan mengarusutamakan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berhubungan dengan operasionalnya. Jika pendekatan-pendekatan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi, namun gagal, maka dapat dilakukan pendekatan hukum.

5. Melibatkan Para Pemangku Kepentingan Lokal, Nasional Dan Internasional Secara Aktif, Terbuka Dan Konstruktif

Kami berkomitmen untuk secara aktif dan konstruktif melibatkan semua pemangku kepentingan PT REKI, termasuk masyarakat, pemerintah, lembaga internasional, lembaga donor dan PBB, penerima manfaat, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional dan internasional. Berkomitmen pada negosiasi yang terbuka dan transparan untuk semua kegiatan pengelolaan bersama yang mungkin dilakukan.

6. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Secara Kolaboratif Berbasis Sumberdaya Budaya dan Alam/hutan

Kami akan mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat untuk masyarakat adat dan lokal dengan prinsip kolaborasi. Program-program ini akan dikembangkan secara terbuka, konsultatif dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan lokal. Program pengembangan masyarakat akan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan mereka yang berkelanjutan. Pengembangan masyarakat harus berbasiskan sumberdaya budaya, ketersediaan sumberdaya alam dan hutan atau integrasi dengan pengetahuan modern.

7. Pengakuan, penghormatan dan penguatan hak-hak para pekerja

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang yang bekerja dalam kegiatan perusahaan kami, sesuai dengan hukum lokal, nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kami memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keragaman tanpa memandang etnis, agama, kecacatan, jenis kelamin, afiliasi politik, orientasi seksual atau keanggotaan serikat. Hal ini sejalan dengan Kebijakan internal ketenagakerjaan PT REKI.

8. Kepatuhan Dengan Norma-Norma Lokal Dan Semua Hukum Yang Relevan

Kami memastikan kepatuhan pada norma-norma masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam manajemen dan kegiatan harian serta patuh pada regulasi nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam semua kegiatan dan operasi.

9. Analisa Dampak Hak Asasi Manusia dan Dampak Sosial

Sebagai satu ukuran pencapaian dari komitmen Hak Asasi Manusia, dampak Sosial dan Pelibatan Masyarakat, kami berkomitmen untuk melakukan analisa dampak Hak Asasi Manusia dan dampak sosial. Laporan ini akan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja kedepan. Kami akan memastikan semua sub kontraktor kami untuk juga menghormati HAM serta memastikan dampak kerjasama yang berkaitan dengan kami tidak berdampak negatif terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia dan dampak sosial budaya.

Jambi dan Sumatera Selatan, 30 November 2015

(Effendy A. Sumardja)

Presiden Direktur